



**KEPAHIANG**

**SELASA, 11 OKTOBER 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**11 OPD Tak Kooperatif Serahkan SPj kepada BPK**

**KEPAHIANG** - Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kepahiang, sebanyak 11 diantaranya dinilai tidak kooperatif. Itu terkait penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu dalam audit pendahuluan dan kepatuhan tahun anggaran 2022.

Sejumlah OPD tak kooperatif itu, masing-masing Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM). Berikutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Juga Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Hingga saat ini progres penerimaan dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa dari beberapa OPD tersebut masih 0 persen. Kecuali Dinkes Kepahiang yang beberapa item SPj sudah menunjukkan perkembangan. Seperti SPj Honorarium Narasumber mencapai 50 persen. Juga Disparpora yang sudah menyampaikan SPj Honorarium Narasumber 20 persen. Sementara

SPj terkait rekap perjalanan dinas masih di angka 0 persen untuk 11 OPD tersebut.

Penelusuran RB, kondisi ini akhirnya memaksa BPK mengeluarkan surat kepada Pemkab Kepahiang. Surat Nomor: 08/PDPT-BLJ-PEND/KT/10/2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang. Dalam surat tersebut BPK memberikan tenggat waktu hingga 11 Oktober 2022 (hari ini, red) untuk 11 OPD tersebut menyerahkan SPj-nya. Apabila dalam waktu yang ditentukan dokumen tersebut tak juga diterima, maka tidak ada kesempatan untuk dokumen susulan.

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU ketika dikonfirmasi RB mengaku belum mengetahui pasti terkait surat BPK tersebut. Dia justru mengklaim bahwa pada dasarnya seluruh OPD sudah kooperatif. Hanya saja mungkin ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi sebelum akhirnya diserahkan kepada BPK.

"Kalau memang ada surat dari BPK mengenai hal itu, kita akan minta kepada Sekretaris Daerah untuk segera menginstruksikan kepada OPD untuk segera menyelesaikan apa yang diminta oleh BPK. Jangan sampai karena beberapa OPD yang tidak kooperatif, seluruh tata kelola pemerintahan di Pemkab Kepahiang terdampak," singkatnya (sly)